

Peran Tentara Nasional Indonesia (Kodam I Bukit Barisan) Dalam Mendukung Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Danau Toba

Nalindro Nusantoro¹, I Made Chandra Mandira², Hanief Saha Ghafur³ dan Arthur Josias Simon Runturambi⁴

¹Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia, nalendro@hotmail.com

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Nasional, imadechandramandira@undiknas.ac.id

³Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia, hanief.saha@ui.ac.id

⁴Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia, simonrbi@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana peran TNI khususnya Kodam I Bukit Barisan dalam melaksanakan tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP), yaitu dalam mendukung pengembangan Daerah Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba yang berkelanjutan dalam bidang sosial, budaya, lingkungan dan ekonomi. Selanjutnya penelitian ini juga dimaksudkan untuk melihat respon dari kementerian dan lembaga terkait terhadap peran dan keterlibatan TNI melalui berbagai kegiatan yang mendukung pengembangan DPSP Danau Toba. Tujuan terakhir dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan merumuskan langkah-langkah TNI selanjutnya dalam mendukung pengembangan pariwisata yang berkelanjutan di DPSP Danau Toba. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan wawancara kepada narasumber kunci, dan didukung oleh studi literatur. Hasil penelitian yakni peran TNI cukup penting dalam mendukung pariwisata berkelanjutan di Wilayah Danau Toba dikarenakan TNI memiliki tugas dalam OMSP yang bersinergi dengan masyarakat dan pemerintah untuk bersama-sama mewujudkan kepentingan nasional yakni mendukung pengembangan Daerah Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba yang berkelanjutan dalam bidang sosial, budaya, lingkungan dan ekonomi. Kodam I Bukit Barisan telah melaksanakan tugas OMSP salah satunya di bidang pariwisata untuk mendongkrak pariwisata berkelanjutan. Sebagai saran diharapkan penelitian ini bisa dilanjutkan dengan menggunakan metodologi yang berbeda, selanjutnya penelitian ini bisa digunakan sebagai masukan kepada Kodam lainnya yang berada di wilayah DPSP yang ada di Indonesia.

Kata Kunci: Peran TNI, Pariwisata Berkelanjutan, Danau Toba.

ABSTRACT

This research is conducted to see the role of Indonesian National Armed Forces (TNI), This research was conducted to see how the role of the TNI, especially the Bukit Barisan Military Command I, in carrying out Military Operations Other Than War (OMSP) tasks, namely in supporting the development of the Lake Toba Super Priority Tourism Area (DPSP) which is sustainable in the social, cultural, environmental and economic fields. Furthermore, this research is also intended to look at the response of the relevant ministries and institutions to the role and involvement of the TNI through various activities that support the development of the Lake Toba DPSP. The final objective of this research is to find out and formulate the TNI's next steps in supporting sustainable tourism development in the Lake Toba DPSP. This study uses a qualitative approach with interviews with key informants, and is supported by literature

studies. The results of the research are that the role of the TNI is quite important in supporting sustainable tourism in the Lake Toba Region because the TNI has a duty in OMSP which synergizes with the community and government to jointly realize the national interest, namely supporting the development of a sustainable Lake Toba Super Priority Tourism Area (DPSP) in the field of social, cultural, environmental and economic. Kodam I Bukit Barisan has carried out OMSP tasks, one of which is in the tourism sector to boost sustainable tourism. As a suggestion, it is hoped that this research can be continued using a different methodology, then this research can be used as input to other Regional Military Commands in the DPSP area in Indonesia.

Keywords: The Role of TNI, Sustainable Tourism, Lake Toba.

Naskah diterima: 14 September 2022, direvisi: 16 Juli 2023, diterbitkan: 15 Agustus 2023

DOI: 10.37253/altasia.v5i2.6886

PENDAHULUAN

Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki tugas pokok dan tanggung jawab dalam menjaga kedaulatan negara dan mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2004. Ada dua tugas pokok TNI yaitu Operasi Militer Untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Dalam kondisi perang tugas pokok TNI dilakukan sesuai dengan operasi untuk perang, namun dalam kondisi damai maka TNI dapat menjalankan tugas pokok Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Dalam pelantikan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) yang dilakukan pada tanggal 17 November 2021, Presiden Joko Widodo memberikan pesan dan arahan kepada TNI AD untuk ikut membantu dan mengawal program pemerintah (detik.news, 2021). Di masa damai seperti saat ini maka tugas militer banyak digunakan dalam kekuatan diplomatik dan ekonomi untuk mencapai tujuan nasional (Danne, 2002). Tujuan nasional yang diharapkan dalam konteks ini adalah ikut mengawal dan mendukung program strategis nasional dalam pengembangan Daerah Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba.

Berdasarkan pasal 7 ayat 2 UU No 34 Tahun 2004 tentang OMSP terdapat 14 poin yang menjabarkan tugas pokok TNI di luar masa perang dan dari 14 poin tersebut terdapat poin-poin yang dapat dikaitkan dengan peran TNI dalam mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan di DPSP Danau

Toba. Poin penting terkait sektor pariwisata terdapat dalam beberapa poin, antara lain adalah poin No. 5, yaitu “mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis,” dalam hal ini DPSP Danau Toba dengan rencana pengembangan kedepannya. Poin selanjutnya dalam pasal 7 ayat 2 adalah poin No. 9, yaitu “membantu tugas pemerintah daerah”, yang dalam konteks ini adalah pemerintah Provinsi Sumatera Utara serta 8 pemerintah kabupaten yang ada di Kawasan Danau Toba. Poin terakhir, yaitu poin No. 12 yang menyebutkan bahwa TNI bertugas “membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan.” Poin ini terkait dengan penanggulangan apabila terjadi bencana alam di sekitar wilayah Danau Toba yang dapat menghambat pengembangannya sebagai DPSP.

Pemerintah Republik Indonesia telah menjadikan sektor pariwisata sebagai program prioritas nasional dan fokus membangun destinasi-destinasi pariwisata yang unggul dan berkelas dunia. Sebagai salah satu *leading sector* yang berkontribusi besar pada PDB Nasional, yaitu 4,8% di tahun 2019 (lokadata.id, 2020), pembangunan pariwisata yang unggul dan berkelas dunia tersebut dimulai saat Presiden Joko Widodo menetapkan 10 (sepuluh) Destinasi Pariwisata Prioritas yang kemudian difokuskan menjadi 5 (lima) Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) yaitu Danau Toba, Likupang, Borobudur, Mandalika dan Labuan Bajo.

Salah satu dari 5 DPSP yang telah ditetapkan oleh pemerintah adalah kawasan

Danau Toba. Sebagai destinasi pariwisata super prioritas kawasan Danau Toba saat ini sedang didorong pengembangan potensi kawasannya yang selama ini belum berjalan dengan maksimal. Kawasan Danau Toba dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) ditunjuk sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang dalam perencanaannya ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 81 Tahun 201, yaitu tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Danau Toba dan sekitarnya.

Dalam pengembangan Kawasan diperlukan sinergi dengan masyarakat setempat. Keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata merupakan syarat utama untuk memastikan keberlanjutan pembangunan pariwisata (Tyran & Sausgruber, 2005). Masyarakat lokal memainkan peranan krusial dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, sehingga perlu adanya partisipasi, pemberdayaan, dan perencanaan untuk mendongkrak pariwisata didalamnya. Selama ini, masyarakat lokal dipandang sebagai pemangku kepentingan yang pasif dan reaktif (Daldeniz & Hampton, 2013). Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat mampu memberikan implikasi positif bagi kehidupan masyarakat, baik ditinjau dari dimensi ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, maupun politik (Darmayanti & Oka, 2020). Sehingga keterlibatan TNI memiliki peranan dalam pendekatan ke masyarakat perihal pariwisata, strategi dan sinergi antar semua lembaga menjadi keharusan (Mandira, 2022).

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana peran TNI khususnya Kodam I Bukit Barisan dalam melaksanakan tugas OMSP, yaitu untuk mendukung pengembangan DPSP Danau Toba yang berkelanjutan dalam bidang sosial, budaya, lingkungan dan ekonomi. Selanjutnya penelitian ini juga dimaksudkan untuk melihat respon dari kementerian dan lembaga terkait terhadap peran dan keterlibatan TNI melalui berbagai kegiatan yang mendukung pengembangan DPSP Danau Toba. Tujuan

terakhir dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan merumuskan langkah-langkah TNI selanjutnya dalam mendukung pengembangan pariwisata yang berkelanjutan di DPSP Danau Toba.

KAJIAN PUSTAKA

Pariwisata Berkelanjutan

Pengembangan DPSP Danau Toba perlu memperhatikan aspek keberlanjutan dalam bidang, sosial, budaya, lingkungan dan ekonomi sesuai dengan konsep United Nations World Tourism Organization (UNWTO) dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan. Keberlanjutan ekonomi terkait dengan upaya menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil. Keberlanjutan sosial terkait dengan upaya menjamin keadilan sosial dalam distribusi manfaat dan kontribusi sosial sehingga konflik tumpang tindih penguasaan dapat dihindari. Keberlanjutan lingkungan terkait dengan upaya menjaga kondisi lingkungan yang kondusif, melalui pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berlebihan dan kelestarian lingkungan hidup yang terjaga. Aspek berkelanjutan ini secara langsung juga dapat menjaga tingkat kepuasan wisatawan untuk meningkatkan kesadaran para wisatawan dalam mempromosikan pariwisata berkelanjutan (UNEP & WTO, 2015). Pariwisata berkelanjutan sering disebut dengan *alternative tourism* adalah kepariwisataan yang dikembangkan dalam memperhatikan kelestarian alam dan budaya masyarakat setempat sehingga dapat diwariskan untuk generasi mendatang (Sugiama, 2013). (Bhayu Rhama, 2021) menekankan bahwa pariwisata harus didasari kriteria yang berkelanjutan yang intinya adalah bahwa pembangunan ekologi jangka panjang harus di dukung dan pariwisata harus layak secara ekonomi serta adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat lokal.

Pengembangan pariwisata berkelanjutan meliputi program rancangan, konsep rancangan dengan pendekatan yang selanjutnya di transformasikan kedalam bentuk desain berupa permodelan (Rinaldi, 2018). Pembangunan pariwisata

berkelanjutan di Indonesia menggunakan Pola *Community Based Tourism (CBT)* dan 3 model pendekatan yaitu pendekatan pengembangan *local wisdom tourism*, pendekatan pengembangan desa wisata dan pendekatan pengembangan kewirausahaan sosial (Musaddad et al., 2019). Pelaksanaan pariwisata berkelanjutan tergantung pada dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, industri, dan masyarakat (Sri Widari, 2020).

Rencana pengembangan pariwisata di kawasan Danau Toba tertuang dalam *Integrated Tourism Master Plan (ITMP) 2020*, yang isinya menekankan bahwa kawasan Danau Toba ditetapkan sebagai DPSP, untuk upaya mendukung pembangunan perekonomian nasional secara merata pada wilayah yang telah ditunjuk sebagai DPSP. ITMP sendiri merupakan konsep perencanaan pembangunan daerah pariwisata yang menggabungkan berbagai komponen, seperti infrastruktur, konektivitas, aktivitas, fasilitas, untuk mengoptimalkan nilai ekonomi dan dampak positif untuk masyarakat, bisnis, dan daerah (BPODT, 2020).

Ketahanan Nasional

Ketahanan Nasional merupakan kondisi sekaligus konsepsi pembangunan nasional dalam pencapaian tujuan dan cita – cita bangsa. Sebagai suatu kondisi, Ketahanan Nasional merupakan kondisi dinamis bangsa yang berisi ketangguhan serta keuletan dan kemampuan bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun luar, yang mengancam dan membahayakan integritas, identitas serta kelangsungan hidup bangsa dan negara (kemhan.go.id).

Dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia Tahun 2015 ancaman digolongkan menjadi tiga jenis yaitu ancaman militer, nonmiliter, dan hibrida. Menurut Undang-Undang No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara terdapat 2 (dua) ancaman yaitu ancaman militer dan nonmiliter, namun berdasarkan perkembangan lingkungan

strategis dimana terdapat pergeseran konsep strategi perang dari konvensional menjadi non konvensional dengan lebih banyak menggunakan sarana teknologi dan informasi maka berdasarkan Kebijakan Umum Pertahanan Negara telah dikembangkan menjadi ancaman militer, ancaman hibrida dan nonmiliter. Ancaman nonmiliter yaitu ancaman yang menggunakan faktor-faktor non militer yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman non militer dapat berasal dari luar negeri atau dapat bersumber dari dalam negeri. Ancaman nonmiliter digolongkan ke dalam ancaman yang berdimensi ideologi, politik, sosial budaya, keselamatan umum, teknologi dan legislasi.

Dalam Undang-Undang No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pada pasal 7 dijelaskan tentang tugas pokok TNI yakni operasi militer untuk perang (OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP). Dalam OMSP poin ke-9 (Sembilan) di tekankan “membantu tugas pemerintah daerah”, sehingga TNI memiliki kewajiban dan peranan untuk membantu tugas pemerintah daerah di wilayah dimana bertugas. Selain itu, dalam penyelenggaraan negara dan implementasinya setiap matra memiliki pedoman dalam melakukan kegiatan/bertugas sehingga TNI melakukan tugas yang di emban sesuai dengan petunjuk yang ada.

Dalam Buku Petunjuk Induk tentang Pembinaan Teritorial (binter) TNI Mabes Angkatan Darat Tahun 2007 pada poin 10 tentang sifat yakni; kegiatan binter memiliki sifat sebagai kegiatan yang terkoordinasikan, lintas sektoral, terkait dan terpadu; dan juga untuk kepentingan pertahanan negara dan membantu mengatasi kesulitan masyarakat. Sedangkan dalam lingkungannya fungsi binter untuk membantu pemerintah menyiapkan dan mewujudkan sistem pertahanan semesta, dan dalam lingkup pembangunan nasional fungsi binter diarahkan untuk membantu pemerintah dalam menyukseskan pembangunan nasional, utamanya mengatasi berbagai kesulitan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat dan

mewujudkan ketahanan dalam semua aspek kehidupan masyarakat, dalam rangka ketahanan nasional. Peran TNI Dalam Mendukung Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Danau Toba sesuai dengan kapasitasnya yakni dengan merujuk pada Undang-Undang No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pada pasal 7 dijelaskan tentang tugas pokok TNI, selain itu dipertegas dalam Buku Petunjuk Induk tentang Pembinaan Teritorial (binter) TNI Mabes Angkatan Darat Tahun 2007 tentang sifat dan ruang lingkup fungsi dari TNI AD.

Peran

Peranan tim yang mewujudkan efektifitas mulai dari konteks, komposisi, dan proses di dalamnya hingga solidaritas dengan kelompok sosial yang bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal menjadi kunci (Mandira & Yudha, 2021). Teori tentang peran merupakan hal yang dapat digunakan dalam dunia sosiologis, psikologis dan antropologis yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Dalam kaitannya dengan “peran”, hal ini dianalogikan dengan “tokoh” dalam sebuah dunia tertentu yang memiliki posisi dan diharapkan berperilaku secara tertentu. Hal ini diasumsikan dalam kehidupan masyarakat dimana tokoh-tokoh terkait memiliki kesamaan posisi (Muryani et al., 2016). Pada penelitian ini peran yang dimaksud dengan tokoh-tokoh adalah terkait dengan para narasumber terkait pengembangan DPSP Danau Toba, yang dibahas secara khusus yaitu peran dari Pangdam I Bukit Barisan mewakili (TNI) dalam ikut serta mendukung pengembangan pariwisata di wilayahnya.

Dampak dari peran seorang pembuat kebijakan menurut Vines (2005) dapat bermacam-macam dari yang langsung dirasakan atau tidak langsung dan dapat mempengaruhi mulai dari tingkat individu masyarakat atau daerah. Selanjutnya, pengembangan DPSP Danau Toba dapat mempengaruhi sektor-sektor tertentu dari suatu masyarakat secara berbeda dari satu dengan yang lain dan menguntungkan beberapa kelompok dan merugikan orang lain. Untuk itu TNI juga dapat berperan dalam

mengantisipasi dampak negatif dari pengembangan pariwisata. Peran TNI tidak berdiri sendiri, melainkan bekerja sama dan bersinergi dengan pemerintah daerah (Widyaningrum et al., 2020). Kerjasama antara TNI dengan Pemerintah, kemudian pendekatan keamanan manusia berupa pengamanan perorangan menjadi peranan krusial (Santi, 2020).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian yang berjudul Peran TNI (Kodam I BUKIT BARISAN) dalam mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan di Danau Toba ini, menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif. Selanjutnya tujuan penelitian ini untuk mengeksplorasi lebih mendalam terhadap sudut pandang, pengalaman, keyakinan dan motivasi narasumber terhadap suatu hal yang penting dalam penelitian.

Pengumpulan data penelitian ini salah satunya dengan melakukan wawancara kepada narasumber utama, wawancara ini biasanya diikuti oleh suatu kata kunci. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara semi terstruktur. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dan mendalam mengenai suatu permasalahan yang diteliti dan lebih bebas dalam pelaksanaan wawancara.

Wawancara kepada narasumber utama dalam penelitian ini adalah; Panglima Daerah Militer I Bukit Barisan selaku pemegang Komando terhadap Peran TNI dalam mendukung pariwisata berkelanjutan di Danau Toba, selanjutnya adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah provinsi Sumatera Utara yang memiliki tanggung jawab atas kegiatan pariwisata di wilayahnya, dan terakhir Direktur Utama Badan Pengelola Otorita Danau Toba dalam hal ini mewakili pemerintah pusat berkaitan dengan kebijakan-kebijakan strategis yang diambil guna pengembangan DPSP Danau Toba yang berkelanjutan. Setelah wawancara peneliti melakukan reduksi data dan menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran TNI-Kodam I Bukit Barisan

Peran TNI dalam mendukung pengembangan DPSP Danau Toba berada di bawah Komando Daerah Militer (KODAM) I Bukit Barisan, yang memiliki peran sebagai alat negara bidang pertahanan, dan dalam tugasnya didasari kebijakan dan keputusan politik negara, dengan fungsi-fungsi yang melekat sebagai komponen utama sistem pertahanan negara. Kodam I Bukit Barisan perlu terlibat dan mendukung program strategis nasional dalam pengembangan DPSP Danau Toba, pada tugas pokok OMSP. Kekuatan TNI berpotensi digunakan dalam mendukung pengembangan DPSP Danau Toba, sesuai penjelasan UU Republik Indonesia yaitu membantu tugas pemerintah di daerah, dalam kondisi serta situasi yang memerlukan sarana, alat dan kemampuan TNI dalam mendukung penyelesaian konflik yang dihadapi oleh pemerintah daerah, mengatasi bencana alam yang disebabkan oleh perubahan iklim, kebakaran hutan, pencemaran air dan menurunnya tinggi permukaan air danau. Menurut (Gottselig et al., 2004) bahwa konflik di masa depan dapat disebabkan oleh kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perubahan iklim, peran TNI juga bisa digunakan untuk membantu perbaikan sarana dan infrastruktur yang digunakan oleh masyarakat yang rusak oleh bencana alam.

Selanjutnya tugas dan peran TNI dapat membantu mengatasi konflik sosial yang terjadi di Kawasan Danau Toba, yang disebabkan krisis sumber daya karena penggunaan yang berlebihan. Hal ini selaras dengan Buku Putih Pertahanan Indonesia (2015) yang membahas mengenai perkembangan lingkungan strategis dalam negeri bahwa sumber daya strategis seperti ketersediaan air dapat menjadi sumber konflik baru dan mendorong terjadinya benturan kepentingan jika gagal dalam pengelolaannya. Penting bahwa semua elemen memiliki kesadaran akan potensi terjadinya krisis ketika akses masyarakat akan kebutuhan air menjadi terbatas sehingga dapat

menimbulkan ancaman, yaitu konflik sosial yang jenis ancamannya adalah non militer dan bersumber dari dalam negeri (Buku Putih Pertahanan Indonesia, 2015).

Kodam I Bukit Barisan dibentuk pada tanggal 20 Juni 1986, yang diputuskan melalui ST Kasad No:ST/636/V/1986 tanggal 20 Mei 1986, selanjutnya didasari oleh perintah operasi Kasad TNI No:011/1984 tanggal 22 september 1984 tentang Reorganisasi TNI-AD yang kemudian disempurnakan dengan Surat Telegram Kasad No:STR/430/1984 tanggal 21 Oktober 1984 dan STR/603/1984 tanggal 28 Desember 1984, jumlah Kodam yang ada dikurangi menjadi 10 Kodam. Kodam I/Iskandar Muda, Kodam II/Bukit Barisan dan Kodam III/17 Agustus dilikuidasi atau dikurangi. Ketiga Kodam tersebut dijadikan satu dengan nama Kodam I/Bukit Barisan dan wilayahnya meliputi: Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Riau. Atas dasar itu, Kodam I/BUKIT BARISAN saat itu telah membawahi 6 buah Korem, yaitu Korem 011/Lilawangsa di Lhokseumawe, Korem 012/Teuku Umar di Banda Aceh, Korem 022/Pantai Timur di Pematang Siantar, Korem 023/Kawal Samudera di Sibolga, Korem 031/Wira Bima di Pekanbaru, Korem 032/Wira Braja di Padang. Adapun berdasarkan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Nomor: Kep/67/XII/2005 tanggal 30 Desember 2005 telah dibentuk Korem 033/Wira Pratama Kodam I/BUKIT BARISAN, dengan demikian Korem yang berada di bawah Kodam I/BUKIT BARISAN menjadi 5 Korem (kodam1-bukitbarisan.mil.id, 2021).

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Kodam I BUKIT BARISAN yaitu melaksanakan “Aksi Nyata Reforestrasi Kawasan Danau Toba” dengan penyerahan Bibit Aren kepada komunitas masyarakat yang ada di kabupaten Simalungun, dengan tujuan untuk regenerasi lahan secara alami, penanaman kembali pohon asli yang diharapkan dapat bermanfaat bagi kesehatan serta bernilai ekonomi. Kegiatan reforestasi tersebut dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2021 bersumber dari website

(Kodam I BUKIT BARISAN, 2021) dengan harapan agar aksi nyata dimaksud dapat diikuti oleh instansi lainnya dalam menjaga ekosistem Kawasan Danau Toba dan mengembalikan fungsi hutan sebagaimana mestinya.

Pada kesempatan lainnya, Kodim 0205/Tanah Karo di Kabupaten Karo melaksanakan kegiatan pembinaan lingkungan hidup, dengan penanaman 1000 batang pohon di kawasan pinggir Danau Toba. Kegiatan ini dimaksud untuk tetap menjaga kelestarian hutan dan membantu penyerapan air sehingga meminimalisasi terjadinya bencana banjir dan tanah longsor, dikutip dalam website (Kodam I BUKIT BARISAN, 2021), kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 30 September 2021.

Selanjutnya pada tanggal 7 Mei 2021 dalam kegiatan yang melibatkan dengan seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat, Pangdam I BUKIT BARISAN di Balige, bersama dengan Kapolda Sumatera Utara meninjau penertiban keramba jaring apung (KJA) yang tidak mengikuti aturan. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Toba, Kajari Tobasa dan Ketua Pengadilan Negeri Balige. Kegiatan penertiban KJA merupakan program yang sudah digagas oleh pemerintah pusat dan daerah serta merupakan wujud sinergitas antar pemangku kepentingan. Secara khusus Pangdam menyampaikan dan memberikan pesan bahwa kegiatan ini bentuk dari bahu-membahu dalam menyelesaikan penertiban KJA. Hal ini dilakukan dalam upaya mendukung masyarakat demi perbaikan ekosistem Danau Toba, guna mempercepat upaya mewujudkan Danau Toba sebagai salah satu DPSP di Indonesia (kodam1-bukitbarisan.mil.id, 2021).

Dalam mendukung program pemerintah, Kodam I BUKIT BARISAN memfasilitasi kegiatan kejuaran Grand Prix menembak yang diselenggarakan oleh Perbakin. Kejuaran menembak ini merupakan rangkaian kegiatan HUT ke-71 Kodam I BUKIT BARISAN tahun 2021 dan bentuk dukungan kepada pemerintah untuk membuat event internasional *Sport Tourism* sebagai

ajang promosi DPSP Danau Toba. Kegiatan yang dilakukan di kabupaten Simalungun ini dilaksanakan pada bulan September tahun 2021 (kodam1-bukitbarisan.mil.id, 2021).

Danau Toba Sebagai Pariwisata Berbasis Geopark

Sejarah terbentuknya Danau Toba ditinjau dari segi geologis dan tak terlepas dari sejarah letusan super dahsyat yang membentuk kaldera. Hal ini diungkap oleh (Morona et al., 2017) menurutnya awal gunung api purba ini melakukan aktivitas vulkanik dan terjadi erupsi sangat dahsyat. Gabungan antara proses vulkanik dan tektonik pada letusan gunung api inilah yang menyebabkan bagian tengah gunung cekung memanjang ke arah barat laut hingga tenggara. Letusan tersebut juga menyebabkan terjungkitnya sebagian tanah dengan posisi miring ke arah barat daya yang membentuk Pulau Samosir. Pasca letusan dahsyat itu, Kaldera Toba tertutup bebatuan beku yang kemudian cair dan membentuk danau. (kemenparekraf.go.id, 2021)

Dalam sidang ke-209 Dewan Eksekutif UNESCO di Paris pada tanggal 2 Juli 2020, Danau Toba ditetapkan sebagai UNESCO *Global Geopark*. Hal ini menjadi bukti bahwa pemerintah memiliki komitmen dan kepedulian yang tinggi dalam melestarikan dan melindungi Danau Toba sebagai warisan Geopark dunia. Proses penetapan Kaldera Toba sebagai UNESCO *Global Geopark* merupakan peran dari seluruh pihak, baik pemerintah pusat dan daerah dan juga pemangku kepentingan yang lain termasuk masyarakat. Presiden Joko Widodo juga melihat geopark bukan hanya sebagai kawasan konservasi namun lebih dari itu, yaitu keberadaan *geopark* dapat dimanfaatkan menjadi ruang edukasi dan pengembangan ekonomi masyarakat di kawasan sekitar Danau Toba. (Tempo.co, 2021).

Danau Toba disematkan sebagai pariwisata berbasis "*geopark*" dan disebut sebagai cagar alam yang terdiri dari peninggalan geologi, ekologi, arkeologi, budaya, atau sejarah (Jazaeri Farsani et al., 2013), (Cutler, 2011). *Geopark* ditunjuk untuk

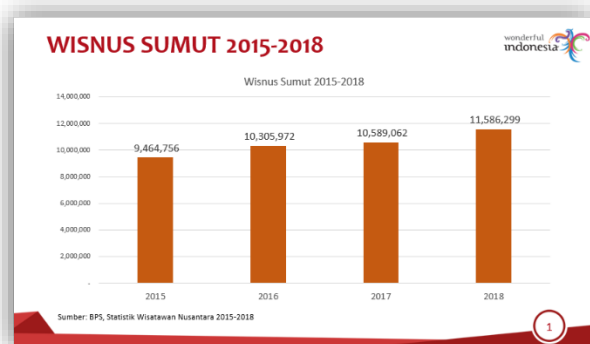
fokus pada komponen berikut: (1) perlindungan dan konservasi; (2) infrastruktur terkait pariwisata perkembangan; dan (3) pembangunan sosial ekonomi dengan menggunakan strategi pembangunan wilayah yang berkelanjutan (Jaafar et al., 2014). Dalam kata lain Danau Toba adalah sebuah destinasi pariwisata berbasis *geopark* yang menawarkan keanekaragaman atraksi berbasis alam, budaya, dan sejarah, berdasarkan keunikannya tersebut pemerintah Indonesia menetapkan Danau Toba menjadi salah satu Destinasi Pariwisata Super Prioritas, dimana wisata *Geopark* diharapkan menjadi daya tarik wisatawan di masa depan (Tempo.co, 2021)

Pengembangan Kaldera Toba sebagai industri pariwisata perlu melibatkan organisasi pemerintah dan swasta dalam kegiatan menjaga kelestarian lingkungan yang berkelanjutan, seperti memperbaiki kawasan hutan yang rusak, membersihkan pencemaran yang terjadi pada air Danau Toba. Untuk itu peran TNI yang terlibat dalam kegiatan tersebut perlu disambut positif oleh pemangku kepentingan yang lain. Pariwisata terus berkembang seiring dengan peningkatan kualitas hidup dan pendapatan ditambah lagi dengan konsep bahwa perjalanan merupakan kebutuhan dasar manusia. Munculnya konsep baru dalam pariwisata, yaitu *Geotourism* (geowisata), menjadi hal yang penting dilakukan sebagai pilar pembangunan berkelanjutan, keberlanjutan sumber daya alam dan budaya yang ditujukan kepada masyarakat lokal untuk memberikan manfaat yang optimal (Ginting & Sasmita, 2018)

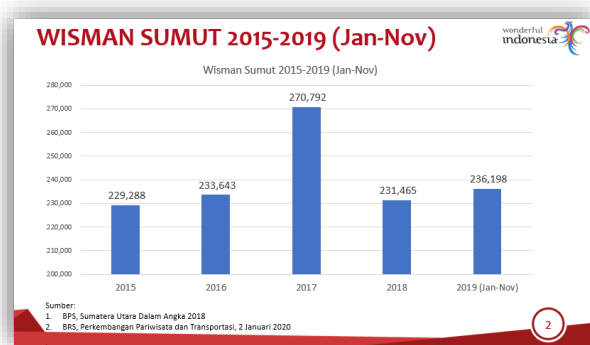
Kaldera Toba sebagai suatu sistem geowisata yang melibatkan unsur-geologi dan komponen kepariwisataan seperti: atraksi, akomodasi, wisata, kegiatan, harus memperhatikan perencanaan dan pengelolannya. Geowisata dapat dianggap sebagai bagian dari wisata alam dan ekowisata, tetapi sebenarnya geowisata adalah bentuk khusus pariwisata yang berfokus pada *geosite*. (Ginting et al., 2017). Dukungan kegiatan pariwisata dalam bentuk kegiatan berbasis kelestarian alam, wisata olah raga, yang bisa bergandengan dan

bekerjasama dengan pihak Kodam I BUKIT BARISAN, perlu ditingkatkan agar sesuai dengan konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan di Kawasan Danau Toba.

Data kunjungan wisatawan yang disampaikan oleh daerah (BPODT, 2020). menunjukkan bahwa tren wisatawan nusantara yang berkunjung ke Danau Toba menunjukkan peningkatan, sedangkan kunjungan wisatawan mancanegara menurun angkanya dari tahun 2017 ke tahun 2018. Selanjutnya dari tahun 2018 terjadi peningkatan yang tidak terlalu tinggi (Gambar 1, Gambar 2).



Gambar 1. Kunjungan Wisatawan Nusantara



Gambar 2. Kunjungan Wisatawan Manca Negara

Pengembangan DPSP Danau Toba, dengan konsep pariwisata berbasis *Geopark* harus menjadi daya tarik bagi para wisatawan, dalam hal ini sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan yang strategis dengan ditunjuknya Danau Toba sebagai DPSP. Berdasarkan data kunjungan wisatawan ke Danau Toba dapat dilihat bahwa ada harapan dan rasa optimisme bagi pengembangan daerah pariwisata.

Selanjutnya yang menjadi perhatian adalah bagaimana sektor pariwisata harus diiringi dengan kebijakan-kebijakan yang tetap menjaga kelestarian lingkungan, agar tujuannya menjadi industri yang penting dalam ekonomi modern dan memberikan dampak positif untuk mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di tingkat nasional, provinsi, dan daerah (Williams, 2016).

Peran TNI Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan DPSP Danau Toba

Peranan TNI dalam menjaga kelestarian lingkungan di DPSP Danau Toba yakni melakukan *reforestasi* dengan penyerahan Bibit Aren kepada komunitas masyarakat yang ada di kabupaten Simalungun, melaksanakan kegiatan pembinaan lingkungan hidup, dengan penanaman 1000 batang pohon di kawasan pinggiran Danau Toba. TNI sejauh ini telah melakukan kegiatan menjaga kelestarian lingkungan Danau Toba, tetapi jika dikaitkan dengan temuan di lapangan sebagaimana wilayah Danau Toba yang merupakan DPSP di bawah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Utara belum melakukan komunikasi resmi antar Lembaga, sehingga peranan TNI hanya sesuai dengan buku petunjuk yang TNI miliki.

Pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Utara mendukung program dan kegiatan yang dilakukan oleh Kodam 1 Bukit Barisan dalam upaya pelestarian lingkungan khususnya dalam penanaman pohon dan penertiban keramba jarring apung yang ada di Danau Toba guna mendukung pariwisata berkelanjutan di Kawasan DPSP Danau Toba. Selain itu *sport tourism* (menembak, dayung, dan *offroad*) yang dilaksanakan oleh Kodam 1 Bukit Barisan menarik wisatawan sehingga membantu pengembangan DPSP Danau Toba.

Dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan, Danau Toba memiliki daya tarik wisata alam yakni sumber daya alam yang potensial serta memiliki daya tarik bagi pengunjung baik dalam keadaan alami

maupun setelah ada usaha budi daya. Potensi wisata alam yang ada di Danau Toba, yaitu *flora fauna*, keunikan dan kekhasan ekosistem, gejala alam, kaldera dan danau, serta budi daya sumber daya alam. Seluruh aspek tersebut sejalan dengan konsep daya tarik wisata. Di samping itu pengembangan pariwisata berkelanjutan perlu mengedepankan pada aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya.

Aspek pertama dari pengembangan pariwisata berkelanjutan adalah lingkungan di kawasan Danau Toba. Lingkungan yang berkelanjutan berarti tidak ada pemborosan penggunaan sumber daya alam atau *depletion of natural resources*; dan juga tidak ada polusi dan dampak lingkungan lainnya; serta terdapat kegiatan peningkatan *usable resources* ataupun *replaceable resource* dan ini terwujud melalui kegiatan penanaman pohon *Toba Go Green* dan patroli keramba apung di sekitar wilayah Danau Toba yang dilakukan secara rutin oleh Kodam 1 Bukit Barisan.

Aspek kedua yakni ekonomi. Kodam 1 Bukit Barisan pernah mengadakan *event Indonesia Internasional Long Range Shooting Grand Prix 2021* pada tanggal 4 September 2021 dengan bekerja sama dengan Perbakin Provinsi Sumatera Utara. *Sport tourism* merupakan industri baru di Indonesia yang menjadi perhatian khusus untuk menaikkan pendapatan daerah, dikarenakan permintaan wisatawan yang ingin mencari sebuah pengalaman olahraga, serta respon industri terhadap permintaan pariwisata olahraga cukup tinggi (Wardana, Angga Putra, Sanawiri, 2018).

Kegiatan ekonomi dari pariwisata sangat sensitif dan rentan terhadap kondisi ketidakstabilan, ketika wisatawan membuat keputusan tentang tujuan perjalanan, mereka cenderung untuk menghindari daerah bergolak yang penuh dengan potensi risiko. Wisatawan lebih memilih mengunjungi tempat-tempat yang aman, dengan kerangka kelembagaan yang cukup kuat untuk menjamin keamanan dan hak-hak mereka selama liburan (Álvarez-Díaz et al., 2019). Peran TNI dalam menjaga keamanan di

destinasi wisata dapat mendukung daya tarik wisata dan hal itu merupakan bagian dari tugas pembinaan wilayah yang dilakukan oleh Kodam I BUKIT BARISAN.

Aspek ketiga yakni budaya, temuan di lapangan yang terjadi adalah perilaku masyarakat yang sulit dikendalikan di perairan Danau Toba. Perilaku masyarakat yang sulit dikendalikan menjadi tantangan khususnya bagi Kodam 1 Bukit Barisan. Meskipun demikian, berdasarkan wawancara di lapangan dengan pihak Kodam 1 Bukit Barisan meyakini bahwa perilaku masyarakat di perairan Danau Toba dapat dikendalikan dengan seiring waktu karena pemerintah bersama *stakeholder* melakukan pembinaan yang rutin demi mewujudkan program DPSP Danau Toba. TNI telah menguraikan prinsip menyatukan konsep pariwisata keberlanjutan untuk menguraikan resolusi konflik yang ada (Maulana & Pratama, 2021) yakni membantu mengatasi kesulitan masyarakat yang tertuang dalam. Buku Petunjuk Induk tentang Pembinaan Teritorial (binter) TNI Mabes Angkatan Darat Tahun 2007

TNI AD dalam hal ini Kodam 1 Bukit Barisan memiliki peranan krusial dalam menjaga kelestarian lingkungan dan juga mewujudkan pariwisata berkelanjutan sesuai dengan program DPSP Danau Toba di Sumatera Utara. Dalam OMSP poin ke-9 (Sembilan) di tekankan “membantu tugas pemerintah daerah”, sehingga TNI memiliki kewajiban dan peranan untuk membantu tugas pemerintah daerah di wilayah dimana bertugas. Peran TNI sesuai dengan Buku Petunjuk Induk tentang Pembinaan Teritorial (binter) TNI Mabes Angkatan Darat Tahun 2007 tentang sifat dan ruang lingkupnya yakni; kegiatan binter memiliki sifat sebagai kegiatan yang terkoordinasikan, lintas sektoral, terkait dan terpadu; dan juga untuk kepentingan pertahanan negara dan membantu mengatasi kesulitan masyarakat.

Peran TNI Dalam Mempercepat Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan DPSP Danau Toba

Dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan indikator yang diperhitungkan

adalah perencanaan strategis, implementasi, monitoring, dan evaluasi (Nowacki et al., 2018). Perencanaan strategis telah dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif selaku pihak yang secara langsung membawahi segmentasi pariwisata melalui program DPSP Danau Toba yang melalui Integrated Tourism Master Plan (ITMP) 2020 telah dijabarkan secara komprehensif. Pengembangan pariwisata di Danau Toba saat ini sedang dalam tahap implementasi, yakni program DPSP, sebelum nantinya masuk dalam tahapan monitoring dan evaluasi. Dalam jurnal (Higginbottom & Scott, 2008) untuk mencapai keberlanjutan pariwisata khususnya alam diperlukan konsep *triple bottom line* (perolehan profit, ukuran kepedulian sosial, pelestarian lingkungan) dengan memaksimalkan manfaat alam, pengunjung, komunitas, dan bisnis pariwisata.

TNI memiliki peranan cukup krusial dalam mendukung kegiatan pariwisata DPSP Danau Toba yakni dengan membantu percepatan program pemerintah dalam upaya vaksinasi Covid-19. Sebagaimana diutarakan oleh Kodam 1 Bukit Barisan dalam hasil wawancara di lapangan yakni “Kodam melancarkan program vaksinasi massal secara serentak dengan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Simalungun dan daerah setempat dan juga melakukan pelaksanaan kegiatan vaksinasi yang dilaksanakan di sela-sela kegiatan latihan satuan Kodam I/BUKIT BARISAN di seputaran wilayah Danau Toba.”

Sejatinya mendukung kegiatan pariwisata bukanlah menjadi tugas pokok dari TNI, tetapi dalam OMSP dijabarkan bahwa TNI memiliki tugas untuk membantu pemerintah daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara mengutarakan ucapan terimakasih kepada Kodam 1 Bukit Barisan dalam mempercepat vaksinasi di DPSP Danau Toba, disamping itu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara berharap seluruh SDM pariwisata di Kawasan Danau Toba dapat divaksin sehingga meningkatkan kepercayaan wisatawan untuk datang ke Danau Toba.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berharap dapat menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Kodam I Bukit Barisan kedepannya khususnya dalam hal peningkatan rasa aman bagi para wisatawan yang berkunjung ke DPSP Danau Toba.

Selain vaksinasi, TNI menyelenggarakan *event Indonesia Internasional Long Range Shooting Grand Prix 2021* yang dimana pengembangan *sport tourism* dilakukan oleh TNI. Secara tidak langsung *sport tourism* memberi dampak nyata terhadap pendapatan masyarakat sekitar (Castyana et al., 2020). Keuntungan secara jelas dari *sport tourism* adalah penciptaan lapangan kerja, keuntungan bagi pengusaha lokal, menambah pajak, serta menambah investasi khususnya dalam infrastruktur dan fasilitas olahraga yang ada (Lupikawaty & Wilianto, 2013). *Multiplier effect* menjadi fokus dari *sport tourism* (Masjhoer et al., 2018). TNI telah berkontribusi nyata dalam mendukung kegiatan pariwisata melalui berbagai kegiatan yang telah dilakukan. Dukungan TNI dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan yang mengedepankan aspek lingkungan, ekonomi, dan budaya secara nyata telah dilakukan sehingga TNI telah turut berperan dalam pariwisata sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan.

Berdasarkan hasil survey (Kepuasan Publik terhadap Kinerja Lembaga Negara) yang dikeluarkan oleh Parameter Politik Indonesia mayoritas masyarakat menilai TNI sebagai lembaga dengan kinerja terbaik, Parameter Politik Indonesia melakukan survei secara acak terhadap 1.200 responden yang tersebar di 34 provinsi pada 3-8 Februari 2021, dengan tingkat kepercayaan 95%. (katadata, 2021). Selanjutnya diperkuat dalam survey (Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Institusi) Indikator Politik Indonesia TNI menjadi institusi yang dipercaya oleh

masyarakat, survey ini dilakukan pada Februari 2021, dengan pendekatan metode *simple random sampling* melalui telpon kepada 1200 responden, dengan tingkat kepercayaan 95% (katadata, 2021). Kepercayaan masyarakat serta harapan dari lembaga pemerintah (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Utara) kepada TNI perlu dijadikan energi lebih bagi TNI khususnya Kodam I Bukit Barisan dalam meningkatkan peran guna mendukung pariwisata berkelanjutan di DPSP Danau Toba, sehingga dapat mempercepat program strategis nasional.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Peran TNI dalam hal ini Kodam I Bukit Barisan, harus dapat berperan lebih dalam mendukung pembangunan pariwisata berkelanjutan di Danau Toba. Peran tersebut sejalan dengan butir-butir terkait dalam UU TNI No. 34 tentang tugas pokok OMSP. Khususnya yang terkait dengan penanganan menjaga objek vital negara dalam hal ini Kawasan DPSP Danau Toba, kemudian ikut membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan program strategis nasional dalam upaya menciptakan pemerataan pembangunan, dan terakhir adalah ikut menanggulangi bencana alam yang terjadi di kawasan Danau Toba.

Lain dari tugas pokok OMSP, menurut (UNWTO, 2015) pemerintah memiliki banyak alat yang dapat digunakan untuk membuat perbedaan seperti kekuatan untuk membuat peraturan dan menawarkan insentif ekonomi, serta sumber daya dan lembaga untuk mempromosikan dan menyebarluaskan praktik yang baik dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di DPSP Danau Toba. Hal ini juga sesuai arahan Presiden Joko Widodo dalam memberi arahan khusus kepada TNI AD, melalui KASAD yang baru dilantik bahwa TNI harus ikut berperan dalam mengawal program strategis nasional.

Arahan Presiden tersebut kemudian menjadi arahan langsung dari Mabes AD kepada jajaran di bawahnya untuk melaksanakan instruksi perintah harian KASAD yaitu: TNI AD harus hadir ditengah-

tengah kesulitan masyarakat apapun bentuknya dan menjadi solusi, melakukan tindakan-tindakan yang berdampak terhadap kesejahteraan rakyat, agar mampu menumbuhkan kecintaan dan kasih sayang rakyat kepada TNI AD, dan meningkatkan sinergitas dengan pemerintah, Polri dan komponen bangsa lainnya dalam rangka menyukseskan program pemerintah.

Ikut serta dalam menjaga kelestarian alam di wilayah Danau Toba, menginisiasi kegiatan pariwisata dan juga ikut aktif dalam program percepatan vaksinasi Covid-19 adalah beberapa peran nyata yang telah dilakukan oleh Kodam I Bukit Barisan dalam mendukung kegiatan pariwisata berkelanjutan di wilayah Danau Toba. Selain itu harapan dari masyarakat dan *stakeholder* lainnya harus dijadikan sebagai motivasi bagi Kodam I Bukit Barisan dalam ikut berperan aktif di tengah masyarakat sesuai UU TNI, UU kepariwisataan dan arahan khusus dari pemerintah melalui arahan Presiden kepada KASAD.

Peranan TNI perlu dimasukkan dalam rencana kerja di *masterplan* dengan tanggung jawab yang lebih besar sesuai dengan tugas dan wewenang yang dapat dilakukan terkait dengan pariwisata berkelanjutan lingkungan. Pemerintah Pusat dengan kementerian-kementerian terkait juga perlu menyiapkan aturan serta anggaran agar dalam melaksanakan tugasnya TNI dapat lebih berperan dalam mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan tanpa mengalami kesulitan pembiayaan.

Perlu dilakukan riset lanjutan khususnya mengenai peran TNI di Kodam lain yang ada di wilayah Indonesia, yang bersentuhan langsung dengan 5 Daerah Pariwisata Super Prioritas. Selain itu penulis mengharapkan penelitian dapat dilakukan dengan metode yang berbeda untuk memvalidasi temuan dari penelitian ini

DAFTAR PUSTAKA

Álvarez-Díaz, M., González-Gómez, M., & Otero-Giráldez, M. S. (2019). Estimating the economic impact of a political

conflict on tourism: The case of the Catalan separatist challenge. *Tourism Economics*, 25(1), 34–50. <https://doi.org/10.1177/1354816618790885>

Bhayu Rhama. (2021). Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Pariwisata Di Kalimantan Tengah. *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 2(2). <https://doi.org/10.37304/jispar.v2i2.361>

BPODT. (2020). Final Report Integrated Tourism Master Plan Preparation For Danau Toba. In *12 April*.

Castyana, B., Rahayu, T., Rumini, R., Hartono, M., Wijayanti, D. G., & Kurniawan, W. (2020). *Measuring Customer Satisfaction on Small-Scale Sport Event: A Case Study of The Sport Event Organizer Subject's Final Project*. <https://doi.org/10.4108/eai.22-7-2020.2300258>

Cutler, S. Q. (2011). Geotourism: The tourism of geology and landscape. *Tourism Management*, 32(1). <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2010.06.021>

Daldeniz, B., & Hampton, M. P. (2013). Dive tourism and local communities: Active participation or subject to impacts? Case studies from malaysia. *International Journal of Tourism Research*, 15(5). <https://doi.org/10.1002/jtr.1897>

Danne, P. D. (2002). Military operations other than war. In *ANZ Journal of Surgery* (Vol. 72, Issue 6, pp. 454–454). <https://doi.org/10.1046/j.1445-2197.2002.02415.x>

Darmayanti, P. W., & Oka, I. M. D. (2020). Implikasi Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat Bagi Masyarakat Di Desa Bongan. *Jurnal Ilmiah Hospitality Management*, 10(2). <https://doi.org/10.22334/jihm.v10i2.167>

Ginting, N., Rahman, V., & Sembiring. (2017). Tourism Development Based on

- Geopark in Bakkara Caldera Toba, Indonesia. *Journal of Physics: Conference Series*, 755(1). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/755/1/011001>
- Ginting, N., & Sasmita, A. (2018). Developing tourism facilities based on geotourism in Silalahi Village, Geopark Toba Caldera. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 126(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/126/1/012163>
- Gottselig, J. M., Hofer-Tinguely, G., Borbély, A. A., Regel, S. J., Landolt, H. P., Rétey, J. V., & Achermann, P. (2004). Sleep and rest facilitate auditory learning. *Neuroscience*, 127(3). <https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2004.05.053>
- Higginbottom, K., & Scott, N. (2008). Strategic planning of wildlife tourism in Australia. *Journal of Ecotourism*, 7(2–3). <https://doi.org/10.1080/14724040802140485>
- Jaafar, M., Shah Nordin, A. O., Abdullah, S., & Marzuki, A. (2014). Geopark ecotourism product development: A study on tourist differences. *Asian Social Science*, 10(11), 42–55. <https://doi.org/10.5539/ass.v10n11p42>
- Jazaeri Farsani, S. M., Jebbink, M. F., Deijs, M., Canuti, M., Van Dort, K. A., Bakker, M., Grady, B. P., Prins, M., Van Hemert, F. J., Kootstra, N. A., & Van Der Hoek, L. (2013). Identification of a new genotype of Torque Teno Mini virus. *Virology Journal*, 10. <https://doi.org/10.1186/1743-422X-10-323>
- Lupikawaty, M., & Wilianto, H. (2013). Potensi Sport Tourism Di Kota Palembang : Perspektif Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Dan Informasi Akuntansi*, 3(2).
- Mandira, I. M. C. (2022). Strategi Digitalisasi Ekonomi Kerakyatan. *Management & Accounting Expose*, 5(1), 11–22. <https://doi.org/10.36441/mae.v5i1.633>
- Mandira, I. M. C., & Yudha, C. K. (2021). Peran Desa Adat Bali Dalam Melancarkan Kebijakan Penanggulangan Pandemi Covid-19. *Journal Publicuho*, 4(1). <https://doi.org/10.35817/jpu.v4i1.15993>
- Masjhoer, J., Susetyarini, O., & Nur, P. (2018). Implementasi Sport Tourism dalam Pemanfaatan Potensi Sungai di Indonesia Studi kasus: International Musi Tribootton 2015. *Conference Paper, May*.
- Maulana, F. I., & Pratama, F. C. (2021). Sustainable Development Planning of Tourist Village Using Participatory Mapping (Case study: Sanankerto Village, Malang, Indonesia). *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 794(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/794/1/012244>
- Morona, F., Melquíades, F. L., & Muller, M. M. L. (2017). Quantification of Organic Matter in Agricultural Soils from the Central Region of Paraná State, Brazil. *Communications in Soil Science and Plant Analysis*, 48(19). <https://doi.org/10.1080/00103624.2017.1411505>
- Muryani, C., Sarwono, & Hastuti, D. (2016). Adaptasi Masyarakat Terhadap Bencana Kekeringan di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. *Prosiding Seminar Nasional Geografi UMS*, 4(2010).
- Musaddad, A. A., Rahayu, O. Y., Pratama, E., Supraptiningsih, & Wahyuni, E. (2019). Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Manajemen*, 2(1).
- Nowacki, M., Kowalczyk-Anioł, J., Królikowska, K., Pstrocka-Rak, M., & Awedyk, M. (2018). Strategic planning for sustainable tourism development in Poland. *International Journal of*

- Sustainable Development and World Ecology*, 25(6).
<https://doi.org/10.1080/13504509.2018.1432513>
- Rachmawati, I. N. (2007). Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 11(1), 35–40.
<https://doi.org/10.7454/jki.v11i1.184>
- Rinaldi, W. S. (2018). Pengembangan Kawasan Objek Wisata Bono Teluk Meranti Dengan Pendekatan Arsitektur Melayu. *JURNAL TEKNIK*, 12(2).
<https://doi.org/10.31849/teknik.v12i2.1799>
- Santi, T. K. (2020). Peran TNI dalam Pembinaan Teritorial (Studi Kasus di Desa Sungai Ceper, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan). *Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization*, 1(2).
<https://doi.org/10.19109/ampera.v1i2.5554>
- Sri Widari, D. A. D. (2020). Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan: Kajian Teoretis Dan Empiris. *Jurnal Kajian Dan Terapan Pariwisata*, 1(1).
<https://doi.org/10.53356/diparojs.v1i1.12>
- Sugiama, A. G. (2013). Manajemen Aset Pariwisata: Pelayanan Berkualitas agar Wisatawan puas dan Loyal. *Bandung: Guardaya Intimarta*, 1.
- Tyran, J. R., & Sausgruber, R. (2005). The diffusion of policy innovations -an experimental investigation. In *Journal of Evolutionary Economics* (Vol. 15, Issue 4). <https://doi.org/10.1007/s00191-005-0261-0>
- UNEP & WTO. (2015). Making Tourism More Sustainable. In *Unep* (Vol. 53, Issue 9).
- Wardana, Angga Putra, Sanawiri, B. (2018). Potensi Sport Tourism Sebagai Daya Tarik Wisata Di Malang Raya (Studi kasus pada klub sepakbola Arema FC). *Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 55 No.
- Widyaningrum, N., Kodar, M. S., Purwanto, R. S., & Priambodo, A. (2020). Peran TNI dalam Penanggulangan Bencana Alam (Studi Kasus Peran Korem 043/Gatam dalam Penanggulangan Bencana Alam di Provinsi Lampung). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1).
<https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.150>
- Williams, G. (2016). Economic impacts from development of the Coastal Town in Queensland on tourism and regional economy. *Resources*, 5(4).
<https://doi.org/10.3390/resources5040048>
- Website:**
- Detik.news. (2021). <https://news.detik.com/berita/d-5815650/pangkostrad-baru-segera-ditentukan-usai-dudung-jadi-ksad-siapa-sosoknya>. (Di akses 30 Oktober 2022)
- <https://bisnis.tempo.co/read/1531237/luhut-geopark-akan-jadi-magnet-pariwisata-nusantara-dan-mancanegara> (Di akses 28 Oktober 2022)
- <https://www.kemhan.go.id/belanegara/> (Di akses 24 Oktober 2022)
- Inews.id. (2021). https://www.inews.id/news/nasional/cat-at-ini-7-perintah-harian-ksad-jenderal-dudung-abdurachman/2_ (Di akses 27 Oktober 2022)
- Katadata. (2021). <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/03/05/parameter-mayoritas-publik-puas-dengan-kinerja-tni> (Di akses 26 Oktober 2022)
- Katadata. (2021). <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/02/11/survei-tni-jadi-institusi->

- paling-dipercaya-publik_(Di akses 25 Oktober 2022)
- Kememparekraf.go.id. (2021). <https://kememparekraf.go.id/ragam-pariwisata/Danau-Toba%3A-Sains-VS-Legenda> (Di akses 30 Oktober 2022)
- Kodam1-bukitbarisan.mil.id. (2021). Kodam I/BUKIT BARISAN Gelar Aksi Nyata Reforestasi Kawasan Danau Toba (kodam1-bukitbarisan.mil.id). (Di akses 27 Oktober 2022)
- Kodam1-bukitbarisan.mil.id. (2021). Kodim 0205/TK Tanam 1000 Pohon di Pinggiran Danau Toba (kodam1-bukitbarisan.mil.id) (Di akses 29 Oktober 2022)
- Kodam1-bukitbarisan.mil.id. (2021). Pangdam I/BUKIT BARISAN: Dukungan Masyarakat Demi Perbaikan Ekosistem Danau Toba (kodam1-bukitbarisan.mil.id) (Di akses 25 Oktober 2022)
- Kodam1-bukitbarisan.mil.id. (2021). Para Sniper berlomba di Danau Toba untuk mengembangkan Sport Tourism (kodam1-bukitbarisan.mil.id) (Di akses 25 Oktober 2022)
- Lokadata.id. (2020). <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/kontribusi-pariwisata-terhadap-pdb-2010-2019-1582001327>, (Di akses 30 Oktober 2022)
- Tempo.co. (2021). <https://bisnis.tempo.co/read/1531237/luhut-geopark-akan-jadi-magnet-pariwisata-nusantara-dan-mancanegara/full&view=ok> (Di akses 27 Oktober 2022)
- UNWTO (United Nation World Tourism Organization). (2015). <https://studipariwisata.com/analisis/perbedaan-ekowisata-dan-pariwisata-berkelanjutan/> (Di akses 29 Oktober 2022)
- Undang-Undang:**
- Buku Petunjuk Induk tentang Pembinaan Teritorial (binter) TNI Mabes Angkatan Darat Tahun 2007
- Buku Putih Pertahanan Indonesia, 2015
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10. Tahun 2009 Tentang Kepariwisata
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia
- Undang-Undang No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara